

**LAPORAN  
RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN (RTM) FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA  
2021**



**GUGUS PENGENDALI MUTU FAKULTAS  
(GPMF)**

**FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA**

**UIN RADEN FATAH PALEMBANG**

**2021**

## **BAB I PENETAPAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

#### **1. Dasar Hukum**

- a. UU No. 20. Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan nasional
- b. UU No. 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi
- c. permendikbud no.50 tahun 2014 tentang SPMI
- d. Permendikbud no. 87 tahun 2014 tentang SPME
- e. Perpres no.8 tahun 2012 tentang KKNI
- f. permendikbud no.49 tahun 2014 tentang SNPT
- g. surat edaran DIKTI no. 526/E.E3/MI/2014 tentang SNPT program Pascasarjana

#### **2. Gambaran umum**

Rapat Tinjauan Manajemen merupakan prosesi yang dilakukan secara konsisten setahun sekali, mulai dari tingkat fakultas hingga nanti dilakukan rapat akbar di tingkat Universitas dengan membawa dan membahas isu-isu dan berbagai permasalahan yang ada di lingkungan prodi, fakultas, hingga Universitas. Namun jika ada hal-hal yang sangat penting, rapat tinjauan manajemen ini dapat saja berlangsung lebih dari sekali dalam setahun. Rapat tinjauan manajemen ini harus menghadirkan seluruh pimpinan dengan komitmen yang tinggi untuk menghadiri rapat tinjauan manajemen hingga usai. Pada rapat inilah akan dibicarakan hal-hal penting terkait temuan atau hasil-hasil audit baik untuk melakukan tindakan pencegahan maupun untuk melakukan tindakan perbaikan. Sejauh ini, RTM dilakukan dengan komitmen untuk meningkatkan mutu UIN Raden Fatah.

Secara umum yang dimaksud dengan penjaminan mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan sehingga konsumen, produsen dan pihak lain yang berkepentingan memperoleh kepuasan. Dengan demikian, penjaminan mutu Perguruan tinggi adalah proses penetapan dan pemenuhan standar pengelolaan pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga stakeholders memperoleh kepuasan. Untuk itu, Perguruan Tinggi (PT) memilih dan menetapkan sendiri standar pendidikan tinggi untuk setiap

satuan pendidikan. Pemilihan dan penetapan standar itu dilakukan dalam sejumlah aspek yang disebut butir-butir mutu.

Rapat Tinjauan Manajemen di tingkat fakultas membahas berbagai permasalahan yang didapat dari hasil monev pembelajaran yang dilakukan oleh GPMP, dan monev Tridharma yang dilakukan GPMF, selain itu ada hasil Audit Mutu Internal (AMI) yang juga menjadi bahan dalam pembahasan tersebut. Segala permasalahan yang ditemukan dalam proses monev maupun AMI menjadi acuan kepada stakeholders dalam proses RTM dan pada titik akhirnya adalah mencari solusi atas masalah tersebut, ketika permasalahan yang ditemukan pada RTM tingkat fakultas tidak menemui titik terang maka akan dibawa pada rapat yang lebih tinggi di tingkat Universitas.

Standar dibutuhkan oleh PT sebagai acuan dasar dalam rangka mewujudkan visi dan menjalankan misinya. Acuan dasar tersebut antara lain meliputi kriteria dan kriteria minimal dari berbagai aspek yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi. Selain itu, standar juga dimaksudkan memacu PT agar dapat meningkatkan kinerjanya dalam memberikan layanan yang bermutu dan sebagai perangkat untuk mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan tugas pokoknya. Standar mutu juga merupakan kompetensi/kualitas minimum yang dituntut dari lulusan/PT terkait, yang dapat diukur dan dapat diuraikan menjadi parameter dan indikator.

Dalam siklus peningkatan mutu yang berkelanjutan, standar perlu dievaluasi dan direvisi/ditingkatkan melalui benchmarking secara berkelanjutan. Standar yang ditetapkan oleh pemerintah yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2003 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) diatur seminimal mungkin untuk memberikan keleluasaan kepada masing masing satuan pendidikan dan PT untuk mengembangkan mutu layanannya sesuai dengan program studi dan keahlian masing masing.

Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SNP) Bab IX Pasal 35 dan PP No 19 tahun 2005 tentang SNP Bab II Pasal 2 hanya menetapkan 8 lingkup standar nasional pendidikan. Namun dinyatakan juga bahwa SNP disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global. Berarti PT wajib menambah lingkup standar agar dapat meningkatkan kualitasnya dan meningkatkan daya saing bangsa.

Permendikbud No.49 tahun 2014 tentang SNPT menetapkan 24 butir standar mutu yang meliputi standar pendidikan, standar pengabdian kepada masyarakat, dan standar penelitian. Tiga komponen tridarma perguruan tinggi ini masing-masing memiliki 8 standar. Dua puluh empat standar yang ditetapkan oleh Dikti ini apabila dapat dicapai oleh perguruan tinggi, maka perguruan tinggi tersebut dapat dianggap sebagai perguruan tinggi berkualitas baik. Agar mendapatkan predikat memuaskan maka sebaiknya setiap perguruan tinggi menambah standarnya sehingga dapat dikategorikan melampaui standar Dikti.

Upaya peningkatan mutu perguruan tinggi terus menerus dilakukan. Salah satu upaya untuk itu adalah mengembangkan Penjaminan Mutu (Quality Assurance) di perguruan tinggi. Dengan Penjaminan Mutu ini diharapkan tumbuh budaya mutu mulai dari bagaimana menetapkan standar, melaksanakan standar, mengevaluasi pelaksanaan standar dan secara berkelanjutan berupaya meningkatkan standar (Continuous Quality Improvement).

Untuk menjamin mutu secara berkelanjutan ini maka standar mutu yang telah ditetapkan akan diberlakukan. Audit mutu perlu dilakukan agar dapat diketahui perkembangan yang telah dicapai dan yang belum tercapai. Untuk itu audit mutu perlu diimplementasikan di setiap bagian UIN. Untuk mewujudkan hal itulah perlu diadakan sosialisasi hasil AMAI. Tindak lanjut dari sosialisasi hhasil AMI inilah yang akan menjadi salah satu materi yang harus dibicarakan dalam Rapata Tinjauan Manajemen.

### **3. Waktu pelaksanaan dan peserta**

Waktu pelaksanaan RTM tingkat Fakultas dilaksanakan pada Kamis 15 September 2022 yang dilaksanakan di Ruang Laboratorium Fakultas Adab dan Humaniora. Para peserta dalam RTM ini terdiri dari seluruh jajaran dekanat, Ketua dan sekretaris prodi, tenaga kependidikan, dan Gugus penjamim Mutu Prodi dan fakultas. Output yang diharapkan dari kegiatan ini adalah adanya perbaiki kn mutu tiap – tiap fakultas dan prodi di lingkungan fakultas adab dan humaniora

### **4. Acara Inti**

Sesi RTM ini dimulai dengan prosesi pembukaan, dan dilanjutkan oleh sambutan Dekan, guna mengawali acara tersebut. Dalam sambutannya dekan mengarahkan dan mengharapkan agar RTM ini menjadi momen penting guna mengevaluasi kekurangan kekurangan yang ditemukan selama proses monev, pembahasan temuan tahun 2021 dan AMI.

### **RTM 2021**

<b>No</b>	<b>Penanggung jawab</b>	<b>Temuan</b>	<b>Rencana Perbaikan</b>
1.	UPPS, ( bu Merry)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengadaan Laboran bersertifikat</li> </ul>	Mengingatkn calon laboran dalam diklat pelatihan laboran bersertifikat ( Desember 2022)
2.	UPPS	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kerjasama Internasional ( PKM</li> </ul>	-Sudah teraliasasi Tahun 2023 (PKM dengan Imam

		dan Penelitian)	Centre di USA) British Library (Clear)
3.	UPPS (WD 1 dan WD 3)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mahasiswa asing</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Peluang MBKM, Mengundang mahasiswa asing untuk perkenalan di Fahum (2023)</li> <li>-penjajakan dengan University of Malaya,</li> <li>-Perbaiki Website</li> <li>- tanjidor, summer course (paket pariwisata) Mei 2023</li> </ul>
4	Kaprodi dan GPMP	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dokumentasi (RPS, UTS dan UAS)</li> </ul>	Pengumpulan Dokumen akan dilakukan di setiap pertemuan ke4 di Awal semester

### AMI

No	Lembaga	Temuan	Rencana Perbaikan
1.	UPPS	<ol style="list-style-type: none"> <li>SK belum ada SK Penetapan pemberlakuan MBKM dari Universitas.</li> <li>kurikulum prodi SPI 2020 ditemukan Bahasa Inggris sebagai mata kuliah nasional. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan MKWU yang berisi Bahasa Indonesia, Agama, Pancasila, dan Kewarganegaraan yang tertuang dalam Pedoman kurikulum PT.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>akan meminta Kepada Universitas agar segera menyelesaikan konsep payung aturan terkait MBKM</li> <li>Perbaikan telah dilakukan pada saat review kurikulum pada tanggal 28-29 Agustus</li> </ol>
2	Prodi BSA	<ol style="list-style-type: none"> <li>UPPS memberikan dukungan kepada PS untuk menyusun, melaksanakan, mengevaluasi, dan memperbaiki kurikulumnya meskipun belum optimal dalam bentuk pemberian dana, pemberian pendampingan, dan penyediaan pakar yang relevan</li> <li>Konsep MBKM baru pada prodi di Internal, belum ada tahap koordinasi dengan lembaga terkait (PUSTIPD dsb)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>dukungan telah dilaksanakan dengan diadakannya review kurikulum yang telah dilaksanakan</li> <li>akan meminta Kepada Universitas agar segera menyelesaikan konsep payung aturan terkait MBKM</li> </ol>
3.	Prodi S2 SPI	<ol style="list-style-type: none"> <li>Laporan kegiatan terkait penyusunan dokumen Kurikulum tidak tersedia</li> <li>Penetapan profil lulusan sudah memiliki kesesuaian dengan Visi PS namun belum terdokumentasi dengan baik</li> </ol>	UPPS dan tendik akan memaksimalkan E-Arsip agar semua prodi bisa mengakses semua laporan kegiatan sehingga dokumentasi dapat diakses semua orang
4.	Prodi Ilpus	<ol style="list-style-type: none"> <li>Evaluasi Kurikulum telah berjalan namun belum ada pendampingan dari UPPS</li> <li>Ada ketidaksesuaian judul, dg SK Rektor,</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>pendampingan lanjutan telah dilakukan</li> <li>Revisi Kurikulum telah</li> </ol>

		<p>tahun terbit pada dokumen kurikulum KKN ILMU perpustakaan.</p> <p>3. (RPS, materi pembelajaran, rencana tugas, rencana penilaian, instrumen penilaian, dan rubrik penilaian) belum ada</p> <p>4. Nama PJ keilmuan sudah ada tetapi belum di-SK-kan, sehingga belum jalan. (</p> <p>5. Kurikulum MBKM dan pelaksanaannya belum terealisasi</p>	<p>dilaksanakan</p> <p>3. akan memaksimalkan GPMP sebagai pengawas kesesuaian perangkat pembelajaran</p> <p>4. mengajukan PJ keilmuan dalam tahun ini</p>
5.	Prodi Polis	1. Belum melaksanakan kurikulum berbasis MBKM sesuai jadwal UIN	akan meminta Kepada Universitas agar segera menyelesaikan konsep payung aturan terkait MBKM
6.	Prodi SPI	Prodi SPI menolak Laporan hasil Auditor, karena tidak sesuai dengan apa realita audit	

### ISO

No	Lembaga	Temuan	Rencana Perbaikan
1.	UPPS dan GPMF	<ul style="list-style-type: none"> <li>perbaikan format notulensi dan pelaporan tinjauan manajemen</li> </ul>	Notulensi telah diperbaiki dengan memenuhi standar ISO
2.	Perpustakaan	Belum melakukan stock opname	Telah dilakukan Opname pada Bulan Juli 2022
3.	Prodi Ilmu Perpustakaan	Persiapan perangkat pembelajaran tidak terbukti konsisten dijalankan, terkait kontrak belajar	Kontrak belajar dan perangkat pembelajaran telah ada
4.	BSA	Capaian Laporan Kinerja tidak terealisasi	<p>- Sosialisasi melalui perlombaan sekolah dan pesantren (</p> <p>- Media sosial</p> <p>- Perubahan Model Sosialisasi dan survey</p>

### BAB III EVALUASI

Secara garis besar RTM tahun Ini cukup baik dan para peserta juga sudah mengerti tentang pentingnya esensi dari RTM ini, di samping itu ada hal lain yang lebih penting adalah dimana temuan minor yang sempat dibahas pada RTM sebelumnya sebagian besar sudah terselesaikan, hanya ada satu bagian terutama penerimaan mahasiswa asing yang belum ada

kemajuan, kedepannya RTM akan dibuat lebih dinamis dengan namun akan lebih tinggi capaian yang diraih. Secara garis besar banyak temuan terkait sarana dan Prasarana yang masih perlu ditingkatkan terutama ketersediaan Proyektor dan Kenyamanan ruang Perkuliahan

## **BAB V** **PENUTUP**

Demikian laporan Rapat Tinjauan Manajemen ini dibuat dengan memenuhi unsure PPEPP sebagaimana siklus pelaksanaan system penjaminan mutu internal. Harapan dari pelaksanaan RTM ini adalah percepatan pelaksanaan tindak lanjut dari setiap kondisi yang dilaporkan dalam RTM. Diharapkan seluruh Unsur yang ada di Fakultas Adab dan Humaniora dapat dengan serius untuk menyelesaikan permasalahan yang ditemukan dalam RTM tahun 2022